

Model efektifitas keuangan dana darurat dalam mendorong pemulihan ekonomi warga desa Ciherang pasca bencana alam gempa Cianjur

Maulana Malik Muhammad^{1*} & Vicky Septian Rachman²

AKURASI

19

¹Fakultas Bisnis, Universitas Kalbis, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Ilmu Komputer dan Desain, Universitas Kalbis, Jakarta, Indonesia

Abstract

This research examines the management of emergency funds in post-earthquake recovery in Ciherang Village, Cianjur, focusing on challenges in fund distribution. Key issues include bureaucratic delays, poor inter-agency coordination, and inadequate fund allocation compared to actual needs. Administrative hurdles, such as lost documents and lengthy verification, cause significant delays in disbursement. Allocated funds often fail to cover the full extent of damage, forcing residents to seek additional resources for repairs or livelihood restoration. Poor coordination between agencies and unclear bureaucratic processes exacerbate inefficiencies and frustration among affected populations. Many struggle to navigate a system lacking transparency, further hindering recovery efforts. The study highlights the need for reforms to simplify procedures, improve coordination, and align fund allocation with real needs. Such improvements are essential to accelerate recovery and effectively support disaster-affected communities, ensuring timely assistance and reducing financial strain on survivors.

Public interest statements

The study focuses on the importance of emergency fund management in post-disaster recovery. It identifies challenges related to fund allocation and bureaucratic delays and advocates for streamlined processes to provide timely assistance to affected communities. Improved coordination and efficient use of emergency funds can reduce recovery time and financial strain for disaster victims, leading to faster restoration of livelihoods and infrastructure.

Keywords: Emergency fund management, disaster recovery, bureaucratic barriers, fund allocation, fund disbursement reform

Paper type: Research paper

✉ Corresponding: Maulana Malik Muhammad.
Email: maulana.muhammad@kalbis.ac.id

ARTICLE INFO:
Received 3/15/2023
Revised 5/8/2023
Accepted 5/11/2023
Online First 5/23/2023



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 7, No. 1, 2025, 19-32
eISSN 2685-2888



© The Author(s) 2025
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana darurat sebagai instrumen penting dalam pemulihan pasca-bencana, khususnya dalam menelaah tantangan dan efektivitas distribusi dana setelah gempa di Desa Ciherang, Cianjur. Dana darurat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan finansial bagi komunitas terdampak, memungkinkan mereka untuk pulih dari kerusakan fisik dan ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam. Namun, studi ini mengungkap beberapa hambatan signifikan, termasuk prosedur birokrasi yang rumit, koordinasi yang tidak memadai antara instansi pemerintah, dan alokasi dana yang tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Melalui analisis kualitatif dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, penelitian ini menyoroti bahwa keterlambatan pencairan dana sebagian besar disebabkan oleh hambatan administratif, seperti hilangnya dokumen penting dan proses verifikasi yang memakan waktu. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dana darurat yang dialokasikan sering kali tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kerusakan, memaksa banyak warga mencari sumber keuangan tambahan untuk menyelesaikan perbaikan atau memulihkan mata pencaharian mereka. Masalah koordinasi antara instansi pemerintah dan otoritas lokal semakin memperumit distribusi dana, menyebabkan keterlambatan dan frustrasi di kalangan populasi terdampak. Banyak warga kesulitan menavigasi sistem birokrasi yang kurang jelas dan transparan, memperburuk situasi mereka yang sudah sulit. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi dalam pengelolaan dana darurat untuk menyederhanakan prosedur birokrasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat yang terkena dampak. Perbaikan ini sangat penting untuk mempercepat upaya pemulihan dan memberikan dukungan yang lebih efektif kepada komunitas yang terdampak.

Pernyataan kepentingan publik

Penelitian ini menyoroti peran penting pengelolaan dana darurat dalam mendukung upaya pemulihan pasca-bencana. Dengan mengeksplorasi tantangan alokasi dana dan keterlambatan birokrasi, riset ini menekankan pentingnya penyederhanaan proses untuk memastikan bantuan tepat waktu bagi masyarakat terdampak. Bagi masyarakat umum, temuan ini memberikan pemahaman bahwa koordinasi yang lebih baik dan penggunaan dana darurat yang efisien dapat secara signifikan mengurangi waktu pemulihan dan beban finansial bagi korban bencana, serta mempercepat pemulihan mata pencaharian dan infrastruktur di daerah terdampak.

Kata Kunci: Pengelolaan dana darurat, pemulihan pasca-bencana, distribusi dana, koordinasi birokrasi, alokasi dana, reformasi kebijakan

PENDAHULUAN

Pada tanggal 21 November 2022, gempa besar melanda Cianjur, Jawa Barat, dengan magnitudo 5,6 yang berpusat di dekat Desa Ciherang. Bencana ini membawa dampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terutama karena kerusakan fisik pada infrastruktur dan hilangnya mata pencaharian (Yanwardhana, 2023). Masyarakat yang terdampak dihadapkan pada tantangan ekonomi, termasuk kehilangan tempat tinggal dan minimnya sumber daya untuk pulih dari bencana. Salah satu solusi penting dalam pemulihan pasca-bencana adalah pengelolaan dana darurat yang efektif untuk membantu masyarakat dalam menghadapi situasi darurat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi (Hakim et al., 2022).

Meskipun dana darurat merupakan instrumen penting dalam proses pemulihan, literatur menunjukkan adanya kesenjangan dalam efektivitas pengelolaannya. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa dana darurat sering kali tidak dikelola dengan optimal karena berbagai

kendala, seperti prosedur birokrasi yang rumit dan alokasi dana yang tidak mencukupi kebutuhan di lapangan (Kumajas et al., 2021). Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana, yang justru memperburuk situasi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat. Di sisi lain, kurangnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya persiapan masyarakat untuk menghadapi situasi darurat (Adiandari et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model pengelolaan dana darurat yang lebih efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca-bencana di Desa Ciherang. Penelitian ini berfokus pada tantangan dalam alokasi dan distribusi dana serta upaya untuk mempercepat pencairan dana melalui reformasi birokrasi. Selain itu, penelitian ini mengusulkan model keuangan yang dapat diimplementasikan masyarakat untuk mengantisipasi bencana di masa mendatang (Hasnda et al., 2023).

Originalitas penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang mendalam melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti masyarakat terdampak dan pemerintah lokal. Dengan analisis fenomenologis, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara rinci tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola dana darurat serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem pengelolaan dana darurat di masa depan (Hardati, 2013). Penelitian dapat tercipta reformasi dalam pengelolaan dana darurat di tingkat lokal sehingga dana tersebut dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran, serta dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya literasi keuangan dalam mendukung ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan situasi darurat lainnya (Erwin, 2022).

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pemikiran utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan dana darurat bisa menjadi instrumen penting dalam proses pemulihan pasca-bencana. Dana darurat memiliki peran vital, terutama dalam memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat terdampak, misalnya untuk memperbaiki infrastruktur dan memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, efektivitas penggunaannya sering kali terhambat oleh berbagai masalah, mulai dari birokrasi yang rumit hingga alokasi dana yang tidak mencukupi.

Proses pencairan dana darurat biasanya melibatkan beberapa langkah yang cukup kompleks. Mulai dari pengajuan klaim oleh warga, kemudian verifikasi kerusakan oleh pihak berwenang, dan pada akhirnya pencairan dana itu sendiri. Birokrasi yang berbelit-belit dalam proses ini sering menyebabkan keterlambatan, terutama karena banyak persyaratan administratif yang rumit. Banyak warga yang kesulitan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti KTP atau dokumen kepemilikan, yang bisa saja hilang atau rusak akibat bencana. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait juga memperlambat proses penyaluran dana, yang seharusnya bisa lebih cepat dan efisien.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dana darurat yang disalurkan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang mengalami kerusakan berat pada rumah atau aset lainnya. Alokasi dana yang terbatas tidak sebanding dengan besarnya kerusakan di lapangan, memaksa warga untuk mencari pendanaan tambahan, termasuk melalui pinjaman berbunga tinggi. Kondisi ini tentu saja menambah beban ekonomi warga, yang seharusnya bisa fokus pada pemulihan fisik dan mental pasca-bencana.

Penggunaan dana darurat juga mensyaratkan pelaporan yang ketat, di mana warga harus menyertakan bukti pembelian dan dokumentasi perbaikan yang dilakukan. Walaupun pelaporan ini penting untuk memastikan akuntabilitas, bagi warga, terutama mereka yang tidak terbiasa

dengan administrasi formal, proses ini bisa menjadi beban tambahan. Pengawasan yang terlalu ketat justru bisa menciptakan tekanan bagi mereka yang sudah dalam kondisi sulit. Karena itu, reformasi dalam sistem pelaporan diperlukan agar lebih efisien dan mudah diakses.

Pemikiran ini menegaskan pentingnya reformasi dalam pengelolaan dana darurat, terutama dalam penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan fleksibilitas alokasi dana. Selain itu, teknologi digital bisa diterapkan untuk mempercepat proses pencairan dan pelaporan, sehingga bantuan bisa lebih cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan reformasi yang tepat, dana darurat bisa berfungsi optimal sebagai alat pemulihan pasca-bencana, membantu masyarakat bangkit lebih cepat dari dampak yang mereka alami.

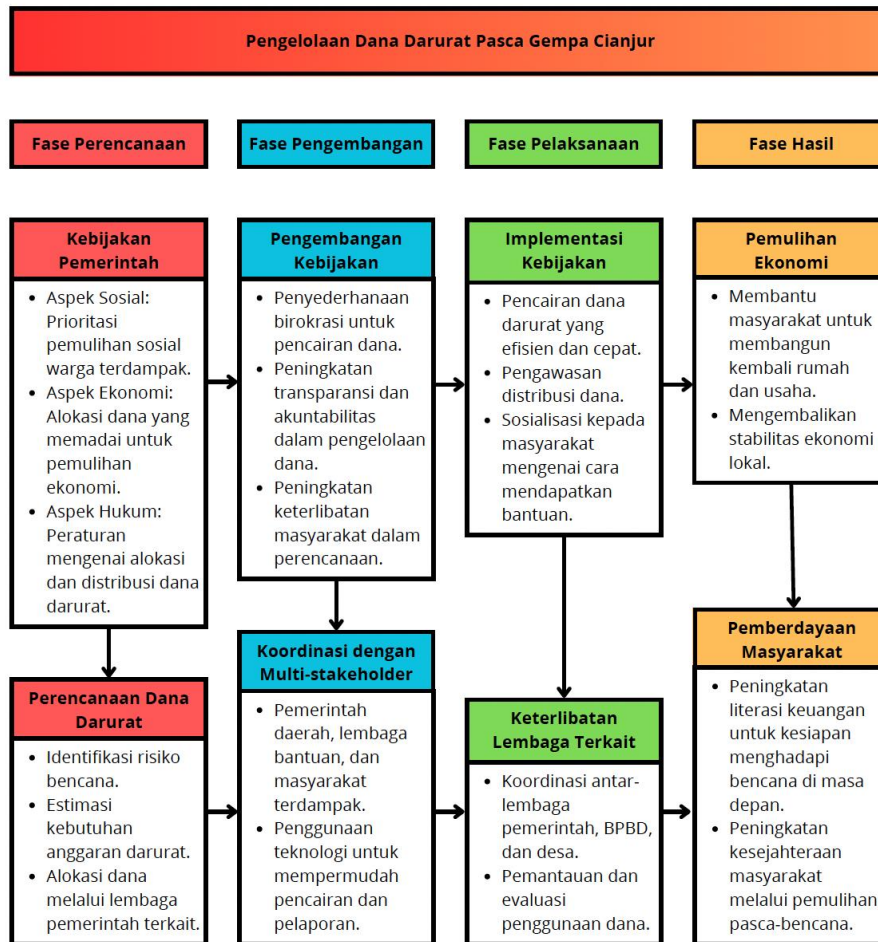
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui metode wawancara mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk warga yang terdampak bencana serta pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana darurat. Lewat wawancara ini, penelitian berusaha memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana darurat, mulai dari pencairan hingga pemanfaatannya dalam pemulihan ekonomi masyarakat (Fossey et al., 2002). Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang dinamika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, lembaga bantuan, dan warga, dalam mengelola dana darurat serta upaya yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya melihat sisi teknis, seperti birokrasi dan prosedur pencairan, tetapi juga menyoroti pentingnya komunikasi, transparansi, dan kolaborasi antara semua pihak. Dengan pendekatan ini, diharapkan solusi yang dihasilkan lebih tepat dan dapat memperbaiki pengelolaan dana darurat, sehingga proses pemulihan di daerah yang terdampak bencana bisa berjalan lebih cepat.

Dana darurat adalah simpanan keuangan yang disiapkan khusus untuk menghadapi situasi darurat atau kejadian tak terduga yang membutuhkan biaya tambahan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan finansial dan rasa aman bagi individu maupun keluarga ketika menghadapi kondisi seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, atau bencana alam (Hakim et al., 2022). Dana ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian, sehingga orang-orang bisa lebih siap menghadapi keadaan yang memerlukan tindakan segera. Mengelola dana darurat sangatlah penting, baik bagi individu maupun keluarga, sebagai bentuk antisipasi menghadapi situasi tak terduga. Dana ini dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menghadapi ketidakpastian ekonomi karena tingginya pengangguran, hingga bencana alam yang merusak kehidupan sehari-hari (Kumajas et al., 2021).

Beberapa strategi dalam mengelola dana darurat meliputi: mencatat pengeluaran bulanan, menghitung total pengeluaran, membuat rencana penghematan, mengoptimalkan pendapatan, dan mempersiapkan investasi jangka panjang (Hasnda et al., 2023). Dalam penanganan bencana, pengelolaan dana darurat yang efektif sangat penting untuk memastikan pemulihan yang cepat dan tepat sasaran. Model efektivitas pengelolaan dana darurat mencakup beberapa komponen penting yang saling berhubungan, dan menentukan seberapa baik dana tersebut dapat diakses, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Model ini memiliki empat dimensi utama: aksesibilitas, kecepatan pencairan, ketepatan penggunaan, dan akuntabilitas (Adiandari et al., 2021).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), perbaikan ekonomi di Indonesia terus berlanjut seiring dengan meningkatnya ketegangan geo-politik antara Ukraina dan Rusia. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 yang tetap kuat, yakni 5,01% dan tidak jauh berbeda dari pencapaian sebelumnya di 5,02% (Erwin, 2022). Di tahun 2022, setelah terjadinya gempa,

ekonomi di kabupaten Cianjur sempat tertahan setelah terjadinya masa tanggap darurat. Dengan tertahannya perekonomian ini, berpengaruh besar bagi sebagian masyarakat di Cianjur karena menggantungkan kebutuhannya dari hasil donasi, sumbangan masyarakat luar daerah, dan dari berbagai organisasi. Upaya pemerintah dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dapat menguatkan kerjasama dari seluruh komponen bangsa (Hardati, 2013).



Gambar 1.
Research Framework

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

METODE

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi interpretif fenomenologi pada warga di Desa Ciherang. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami permasalahan dengan mengembangkan pemahaman dari pengalaman seseorang dan kehidupan sosial (Fossey et al., 2002). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dari hasil upaya pengelolaan dana darurat dan pemulihan ekonomi warga Desa Ciherang pasca Gempa Cianjur dengan melakukan wawancara secara langsung pada tokoh masyarakat dan warga di Desa Ciherang. Informasi yang didapatkan melalui informan yang mengetahui mengenai situasi dan kondisi latar belakang dari permasalahan penelitian. Berikut adalah informan kunci yang akan diwawancarai: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Nurzaini), Kepala Desa/Lurah Desa Ciherang (Acep

Haryadi), tokoh masyarakat Desa Ciherang, pegawai pemerintahan desa, Ketua RT, Ketua RW Desa Ciherang, dan warga atau masyarakat pemukiman terdampak Desa Ciherang.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih berdasarkan karakteristik spesifik, seperti latar belakang, usia, jenis kelamin, domisili, dan profesi yang mereka tekuni, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus interpretif fenomenologi, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman individu terkait fenomena tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif dari pengalaman informan yang terdampak oleh bencana alam gempa Cianjur, memberikan ruang untuk memahami bagaimana warga Desa Ciherang dan pemangku kepentingan memaknai serta menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana darurat dan pemulihan ekonomi pasca bencana gempa.

Pendekatan interpretif fenomenologi ini sangat relevan dengan tujuan penelitian karena memberikan fokus pada pengalaman mendalam informan, yang tidak hanya mencakup fakta-fakta objektif, tetapi juga bagaimana mereka merespons, menginterpretasikan, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, pemilihan informan melalui teknik purposive sampling menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari individu yang benar-benar memahami situasi dan memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang dikaji. Informan memberikan informasi dari proses pencairan dana darurat dimulai dari tingkat pemerintahan hingga masyarakat. Proses ini membantu penelitian untuk menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan relevan, yang pada akhirnya dapat memberikan gambaran utuh tentang tantangan, kendala dari proses pencairan yang dialami serta solusi yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola dana darurat.

Melalui perpaduan teknik purposive sampling dan pendekatan studi kasus interpretif fenomenologi, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan pengalaman warga setempat, tetapi juga memberikan wawasan strategis yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan pengelolaan dana darurat yang lebih efektif di masa depan. Dengan menggali pengalaman subjektif informan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam memahami proses pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat lokal.

HASIL DAN DISKUSI

Gempa bumi yang terjadi di Cianjur memberikan dampak yang sangat besar terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Warga yang terdampak membutuhkan bantuan darurat dengan segera. Dana darurat menjadi salah satu instrumen kunci untuk membantu pemulihan pasca-bencana. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dan pencairan dana darurat menghadapi banyak tantangan. Bagian berikut akan membahas lebih dalam mengenai berbagai aspek terkait pengelolaan, pencairan, dan penggunaan dana darurat, berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber.

Fase Perencanaan

Pengelolaan Dana Darurat

Pengelolaan dana darurat adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan keuangan bisa segera disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Dana ini berfungsi sebagai penopang utama dalam membantu pemulihan fisik dan ekonomi warga yang terdampak, sehingga pengelolaannya harus baik agar distribusi dana berjalan cepat dan tepat sasaran. Pada tahap perencanaan, pemerintah melalui lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan alokasi dana darurat dengan tujuan memberikan respons cepat terhadap dampak bencana. Namun, wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa meskipun dana darurat sudah disiapkan oleh pemerintah, proses pencairannya sering menghadapi kendala yang cukup besar. Hambatan ini umumnya berkaitan dengan birokrasi yang berlapis-lapis, persyaratan administrasi yang rumit, serta kurangnya koordinasi antara lembaga. Hal ini mengakibatkan penundaan penyaluran dana yang sebenarnya diperlukan segera oleh masyarakat untuk memulai proses perbaikan dan pemulihan.

Di samping itu, ada juga kesenjangan antara perencanaan dana darurat di tingkat pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak warga mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang cara mengakses dana atau apa saja syarat yang harus dipenuhi. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa fase perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana darurat perlu diperbaiki agar bantuan bisa disalurkan dengan lebih cepat dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hal perencanaan pengelolaan dana darurat, sangat penting untuk menyederhanakan prosedur birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan agar mereka lebih efektif dalam mengelola dan menyalurkan dana. Dengan perencanaan yang baik, dana darurat bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mempercepat pemulihan masyarakat setelah bencana.

Perencanaan Dana Darurat

Dana darurat yang dialokasikan oleh pemerintah biasanya dirancang untuk berbagai skenario bencana alam, termasuk gempa bumi. Namun, sering kali skala kerusakan yang terjadi melebihi perkiraan, sehingga dana yang tersedia tidak cukup. Wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengungkapkan bahwa,

“Ada kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan nyata di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk kurangnya ketepatan dalam estimasi risiko bencana, perubahan situasi yang cepat setelah bencana, serta terbatasnya sumber daya dalam proses perencanaan.”

Salah satu tantangan terbesar dalam merencanakan dana darurat adalah sulitnya memprediksi dengan akurat skala dan dampak bencana. Meskipun pemerintah berupaya mengantisipasi berbagai skenario, intensitas bencana yang beragam dan perbedaan kondisi geografis membuat perencanaan lebih rumit. Perubahan iklim, yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, juga menambah ketidakpastian dalam perencanaan dana darurat. Selain estimasi risiko yang kurang akurat, ada juga masalah dalam menyesuaikan dana setelah bencana terjadi. Sering kali, situasi di lapangan berkembang lebih cepat daripada yang diperkirakan dalam perencanaan awal. Contohnya, kerusakan infrastruktur yang lebih luas atau kebutuhan medis yang mendesak dapat memerlukan dana yang jauh lebih besar daripada yang dialokasikan. Hal ini menyebabkan

keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar warga secara optimal.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam perencanaan dana darurat. Pemerintah daerah sering kali memiliki anggaran terbatas dan harus mengalokasikan dana untuk sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya, dana darurat sering kali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan pasca-bencana. Proses administrasi yang lambat dan kurangnya koordinasi antara lembaga juga memperparah kesenjangan antara dana yang dialokasikan dan kebutuhan sebenarnya di lapangan.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis dalam perencanaan dana darurat. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi risiko secara lebih akurat dan memperbarui perencanaan berdasarkan data terbaru. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait sangat penting agar dana darurat bisa dialokasikan dan disalurkan lebih efisien dan tepat sasaran. Teknologi informasi dan sistem manajemen bencana yang terintegrasi juga dapat membantu memantau kebutuhan secara real-time dan menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kondisi di lapangan.

Secara keseluruhan, perencanaan dana darurat yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif dan adaptif. Pemerintah harus mampu mengantisipasi berbagai skenario bencana serta memastikan mekanisme penyesuaian yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih siap menghadapi bencana dan memastikan bahwa bantuan keuangan dapat segera disalurkan untuk mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak.

Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana darurat sering kali tidak berjalan dengan baik. Meski banyak lembaga telah diberi peran dalam penyaluran dana, kurangnya sinkronisasi antarinstansi menjadi kendala utama yang memperlambat distribusi dana kepada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan segera. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan keterlambatan dalam berbagi informasi antar lembaga, sehingga menghambat proses pencairan dana darurat.

Wawancara dengan kepala desa mengungkapkan,

“Perangkat desa, yang langsung berhadapan dengan warga terdampak, sering kali kesulitan berkoordinasi dengan lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Sosial terkait penyaluran dana. Selain itu, perangkat desa sering tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi dan distribusi dana, meskipun mereka memiliki pemahaman lebih baik tentang kondisi nyata di lapangan.”

Kurangnya koordinasi ini tidak hanya memperlambat penyaluran dana, tetapi juga menyebabkan ketidaksesuaian antara alokasi bantuan dan kebutuhan nyata di masyarakat. Contohnya, dalam beberapa kasus, dana yang dialokasikan tidak tepat sasaran atau diberikan ke daerah-daerah yang kurang terdampak karena informasi yang diterima tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya peningkatan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa. Prosedur komunikasi yang jelas dan alur distribusi yang terstruktur harus diterapkan untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebutuhan dana dan prioritas bantuan dapat segera ditindaklanjuti. Melibatkan perangkat desa

dalam setiap tahap pengambilan keputusan juga akan memastikan bahwa penyaluran dana darurat lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Fase Implementasi

Pencairan Dana Darurat

Salah satu aspek paling penting dalam penanganan bencana adalah pencairan dana darurat kepada masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencairan dana di Cianjur menghadapi hambatan besar, baik dari sisi birokrasi maupun kelengkapan persyaratan administrasi. Prosedur yang rumit dan berlapis-lapis sering kali memperlambat pencairan dana, yang justru memperburuk kondisi warga yang sangat membutuhkan bantuan dengan segera. Hambatan birokrasi, seperti persyaratan dokumen yang sulit diakses dan sangat detail, memperpanjang proses verifikasi oleh pihak berwenang, sehingga menimbulkan keterlambatan yang seharusnya bisa dihindari. Selain itu, kelengkapan persyaratan administrasi, seperti dokumen identitas yang rusak atau hilang akibat bencana, menjadi tantangan besar bagi banyak warga. Mereka harus meluangkan waktu dan energi untuk mengurus penggantian dokumen-dokumen tersebut, yang akhirnya memperlambat penerimaan dana. Proses yang lambat ini berdampak pada keterlambatan pemulihan fisik dan ekonomi, karena banyak dari warga yang bergantung pada dana tersebut untuk memperbaiki rumah yang rusak atau memulihkan bisnis yang terkena dampak bencana.

Secara keseluruhan, fase pencairan dana darurat di Cianjur masih memerlukan banyak perbaikan. Penyederhanaan prosedur birokrasi dan pengurangan persyaratan administrasi yang memberatkan sangat diperlukan agar pencairan dana dapat dipercepat. Selain itu, dukungan teknis dan sosial yang lebih kuat untuk membantu warga dalam memenuhi persyaratan administrasi juga sangat penting agar proses pemulihan masyarakat yang terdampak bisa berlangsung lebih cepat.

Prosedur Pencairan yang Kompleks:

Wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa prosedur pencairan dana bantuan sangat rumit dan berlapis-lapis. Masyarakat yang rumahnya rusak atau hancur harus melengkapi berbagai dokumen sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan. Dokumen yang diminta termasuk bukti kepemilikan rumah, dokumen identitas seperti KTP dan KK, serta laporan kerusakan yang harus diverifikasi oleh pihak berwenang. Namun, bagi banyak warga yang terdampak langsung oleh gempa, kehilangan dokumen-dokumen penting ini menjadi tantangan besar. Misalnya, warga yang kehilangan KTP atau KK harus mengurus penggantian dokumen tersebut terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan proses pengajuan bantuan.

Proses penggantian dokumen yang hilang sering kali memakan waktu lama karena harus melalui beberapa tahap birokrasi dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Selain itu, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan dokumen pengganti, yang semakin menambah beban di tengah situasi darurat. Akibat dari prosedur yang rumit ini, pencairan dana bantuan tertunda, dan banyak warga yang seharusnya menerima bantuan dengan cepat harus menunggu berbulan-bulan sebelum mendapatkan dana yang sangat dibutuhkan. Hal ini memperpanjang penderitaan warga yang terpaksa tinggal di penampungan sementara atau bergantung pada bantuan dari keluarga dan kerabat.

Situasi ini menggambarkan bahwa kompleksitas prosedur pencairan dana tidak hanya memperlambat proses pemulihan, tetapi juga menambah beban administratif dan psikologis bagi

warga terdampak. Oleh karena itu, reformasi dalam prosedur pencairan dana bantuan sangat diperlukan agar lebih responsif terhadap kondisi darurat yang dihadapi masyarakat. Penyederhanaan persyaratan dokumen dan pemberian dispensasi khusus bagi warga yang kehilangan dokumen akan membantu mempercepat pencairan dana, sehingga warga dapat segera memulai pemulihan dan membangun kembali kehidupan mereka.

Hambatan Birokrasi

Hambatan birokrasi menjadi salah satu kendala utama dalam proses pencairan dana darurat bagi warga yang terdampak bencana. Warga yang rumahnya rusak akibat gempa sering kali harus menghadapi serangkaian prosedur administratif sebelum mereka bisa menerima dana bantuan. Proses ini melibatkan pengurusan dokumen di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kabupaten, hingga instansi pemerintah lainnya. Setiap tingkatan birokrasi memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda, yang sering kali tidak seragam dan membingungkan, terutama bagi masyarakat yang sudah berada dalam kondisi tertekan.

Wawancara dengan Ketua RT mengungkapkan bahwa,

“Banyak warga merasa kesulitan mengakses dana darurat karena prosedurnya tidak jelas dan terstruktur. Mereka tidak selalu mendapatkan informasi yang cukup mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Ketidajelasan ini menambah ketidakpastian dan memperburuk situasi warga yang sudah terdampak secara emosional dan material. Hal ini membuat proses pencairan menjadi lebih lama, karena warga harus bolak-balik melengkapi dokumen atau mendapatkan tanda tangan dari berbagai pihak.”

Minimnya koordinasi antarinstansi juga memperparah masalah birokrasi ini. Warga sering kali kesulitan berkomunikasi dengan berbagai instansi yang masing-masing memiliki otoritas untuk mengeluarkan dokumen tertentu. Hal ini menambah frustrasi di kalangan warga terdampak, yang sudah berada dalam situasi sulit akibat kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Prosedur yang panjang dan tidak efisien ini tidak hanya menunda pencairan dana, tetapi juga menghabiskan waktu dan energi warga yang seharusnya bisa digunakan untuk mulai memulihkan kehidupan mereka. Hambatan birokrasi ini menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem pencairan dana darurat sangat diperlukan. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur dan memperjelas alur pencairan dana agar masyarakat terdampak dapat lebih mudah dan cepat menerima bantuan. Koordinasi yang lebih baik antarinstansi juga diperlukan, sehingga pengurusan dokumen tidak lagi menjadi beban tambahan bagi warga yang sudah berada dalam situasi darurat.

Ketidalcukupan Dana yang Cair

Setelah pencairan, dana yang diterima warga sering kali tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya perbaikan rumah, terutama bagi mereka yang mengalami kerusakan parah. Masalah ini disebabkan oleh alokasi dana yang tidak sesuai dengan skala kerusakan sebenarnya di lapangan. Dalam banyak kasus, dana dialokasikan berdasarkan perhitungan standar yang tidak memperhitungkan perbedaan signifikan dalam tingkat kerusakan antar rumah. Akibatnya, dana yang diterima hanya bisa menutupi sebagian dari biaya perbaikan, dan sisanya harus ditanggung sendiri oleh warga.

Situasi ini memaksa banyak warga untuk mencari sumber pendanaan tambahan guna melanjutkan perbaikan rumah atau menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka. Sumber pendanaan ini bisa berasal dari pinjaman pribadi, tabungan yang mungkin sudah terkuras habis

akibat kebutuhan darurat, atau bahkan pinjaman dengan bunga tinggi, yang justru menambah beban finansial mereka. Kondisi ini semakin memperberat beban para korban bencana, yang selain harus fokus pada pemulihan fisik, juga tertekan oleh masalah keuangan yang terus berlarut. Diperlukan alokasi dana yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tingkat kerusakan nyata agar proses pemulihan bisa berlangsung lebih cepat dan efektif, tanpa membebani masyarakat dengan utang tambahan.

Penggunaan Dana Darurat

Penggunaan dana darurat adalah salah satu faktor penting yang sangat memengaruhi keberhasilan proses pemulihan pasca-bencana. Dalam konteks gempa di Cianjur, penelitian ini menemukan sejumlah masalah terkait pemanfaatan dana darurat yang dialokasikan bagi para korban. Pertama, ada ketidakcocokan antara jumlah dana yang diterima dengan kebutuhan nyata di lapangan. Meskipun dana sudah disalurkan, sering kali jumlahnya tidak cukup untuk menutupi biaya perbaikan infrastruktur yang rusak parah, terutama rumah warga. Hal ini diperparah oleh alokasi dana yang kurang proporsional, di mana standar pemberian bantuan tidak selalu mempertimbangkan tingkat kerusakan secara akurat.

Selain itu, proses penggunaan dana darurat juga menghadapi kendala administratif. Penerima bantuan diwajibkan melaporkan penggunaan dana melalui bukti pembelian material atau dokumentasi perbaikan. Meskipun prosedur ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, dalam praktiknya, hal ini sering menjadi beban tambahan bagi para korban yang masih dalam tahap pemulihan fisik dan emosional. Warga yang tidak terbiasa dengan prosedur administratif atau kehilangan dokumen penting selama bencana juga kesulitan memenuhi persyaratan ini, yang pada akhirnya memperlambat proses pemulihan mereka.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pendampingan dan sosialisasi mengenai cara penggunaan dana serta pelaporan yang tepat turut menjadi kendala. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana darurat, diperlukan reformasi yang tidak hanya menyederhanakan prosedur pelaporan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada warga terdampak agar dapat memanfaatkan dana secara optimal. Dengan begitu, dana darurat bisa lebih tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan secara keseluruhan.

Kewajiban Pelaporan Penggunaan Dana

Setiap penerima dana darurat diwajibkan melaporkan penggunaan dana yang telah mereka terima dengan melampirkan bukti pembelian material atau dokumentasi terkait perbaikan rumah. Meskipun langkah ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, kenyataannya proses pelaporan ini sering menjadi beban tambahan bagi warga yang masih berada dalam situasi sulit. Wawancara dengan warga terdampak bencana mengungkapkan bahwa banyak dari mereka kesulitan menjalankan proses administrasi ini, terutama karena trauma yang mereka alami. Trauma akibat bencana sering kali membuat warga kehilangan fokus dan kesulitan mengurus detail administratif yang diperlukan, memperburuk kondisi mereka yang sudah tertekan secara emosional.

Selain itu, pengawasan ketat dari pihak berwenang terhadap penggunaan dana juga menambah kekhawatiran warga. Mereka khawatir jika tidak dapat memenuhi persyaratan pelaporan yang ketat, dana bantuan yang seharusnya meringankan proses pemulihan justru menjadi beban baru. Warga merasa tertekan untuk segera melengkapi segala bukti dan dokumentasi yang diminta, meskipun dalam situasi sulit mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu atau kemampuan untuk mempersiapkan laporan tersebut dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa, selain memberikan dana bantuan, perlu ada pendekatan yang lebih fleksibel dan penuh empati dari pihak berwenang untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi penerima bantuan. Proses pelaporan yang lebih sederhana, serta pendampingan administrasi, dapat membantu mengurangi tekanan dan memastikan bahwa warga terdampak dapat memanfaatkan dana bantuan secara optimal tanpa tambahan beban psikologis atau administratif.

Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan terhadap penggunaan dana darurat dilakukan dengan sangat ketat oleh pihak berwenang untuk memastikan dana digunakan dengan tepat sesuai kebutuhan pemulihan pasca-bencana. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada warga yang paling membutuhkan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa banyak warga mengalami kesulitan dalam memahami dan menjalankan prosedur pelaporan serta pengawasan yang ditetapkan. Warga yang tidak terbiasa dengan proses administrasi formal sering kali merasa kewalahan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Kewajiban menyertakan bukti pembelian material dan dokumentasi perbaikan rumah menambah beban administrasi, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam situasi sulit.

Banyak warga kebingungan dalam mengumpulkan dokumen yang diminta, karena mereka juga harus fokus pada pemulihan fisik dan psikologis pasca-bencana. Kurangnya pemahaman tentang prosedur yang rumit ini membuat beberapa warga kesulitan dalam proses pelaporan, yang akhirnya mengurangi efektivitas pemanfaatan dana yang seharusnya mempercepat pemulihan. Dalam beberapa kasus, warga bahkan menunda perbaikan rumah karena takut membuat kesalahan dalam pelaporan, yang bisa memengaruhi kelancaran bantuan di masa depan.

Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif dalam pengawasan dana darurat. Sosialisasi yang lebih baik dan pendampingan administrasi sangat diperlukan agar warga terdampak dapat memahami dan menjalankan prosedur pelaporan dengan lebih mudah. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan bantuan dalam proses pelaporan, pihak berwenang dapat memastikan pengawasan tetap berjalan efektif tanpa membebani masyarakat dengan birokrasi yang berlebihan.

Fase Evaluasi

Evaluasi terhadap pengelolaan dana darurat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dana darurat merupakan komponen penting dalam mendukung pemulihan pasca-bencana, ada sejumlah masalah yang signifikan dalam implementasinya. Pertama, hambatan birokrasi dan prosedur administrasi yang rumit memperlambat proses pencairan dana, menyebabkan keterlambatan bantuan bagi warga yang sangat membutuhkannya. Persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi, terutama bagi warga yang kehilangan identitas atau dokumen penting akibat bencana, semakin memperburuk keadaan. Selain itu, proses verifikasi yang lambat dan kurangnya koordinasi antar-lembaga memperpanjang waktu yang diperlukan untuk memastikan dana dapat dicairkan tepat waktu. Jumlah dana yang diterima warga sering kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan perbaikan rumah yang rusak berat. Ketidakcocokan antara alokasi dana dan skala kerusakan yang sebenarnya di lapangan memaksa warga mencari sumber pendanaan tambahan, seperti pinjaman pribadi, yang justru menambah beban finansial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme alokasi dana perlu lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat yang terdampak.

Prosedur pelaporan dan pengawasan penggunaan dana juga menambah tantangan tersendiri. Banyak warga, terutama yang tidak terbiasa dengan administrasi formal, merasa kewalahan memenuhi persyaratan pelaporan yang ketat. Bukti pembelian dan dokumentasi perbaikan rumah sering kali sulit disiapkan, terutama di tengah kondisi trauma dan ketidakpastian yang mereka alami. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan, meskipun penting untuk akuntabilitas, perlu disesuaikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana darurat membutuhkan reformasi, terutama dalam penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan fleksibilitas alokasi dana. Proses pelaporan dan pengawasan juga perlu didukung dengan pendampingan yang lebih intensif agar tidak memberatkan warga yang sedang dalam proses pemulihan. Dengan perbaikan sistem ini, diharapkan pemulihan pasca-bencana bisa berjalan lebih cepat dan efektif, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat terdampak

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan, pencairan, dan penggunaan dana darurat di Cianjur. Hambatan birokrasi, prosedur pencairan yang rumit, serta kurangnya sosialisasi adalah beberapa faktor utama yang menghambat proses pencairan dana bagi masyarakat terdampak. Di sisi lain, kewajiban pelaporan dan pengawasan yang ketat sering kali menjadi beban tambahan bagi warga yang masih dalam kondisi trauma. Untuk meningkatkan efektivitas pencairan dan penggunaan dana darurat, reformasi birokrasi yang berfokus pada penyederhanaan prosedur sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga serta memberikan sosialisasi yang lebih jelas kepada warga mengenai proses pencairan dana darurat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemulihan pasca-bencana bisa berjalan lebih cepat dan efisien, serta dana darurat dapat segera digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan keuangan dalam penanganan bencana di Cianjur, terutama terkait pengelolaan, pencairan, dan penggunaan dana darurat.

Batasan dan saran untuk penelitian selanjutnya

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana darurat dalam pemulihan pasca-bencana memegang peran yang sangat penting, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang perlu diatasi. Hambatan birokrasi yang kompleks, ketidakcukupan alokasi dana, serta proses pengawasan yang memberatkan menjadi beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas dana darurat dalam membantu masyarakat terdampak. Selain itu, kesulitan masyarakat dalam memenuhi persyaratan pelaporan yang rumit juga mengindikasikan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi di lapangan. Temuan ini menekankan perlunya reformasi dalam prosedur pencairan dan pelaporan dana, dengan fokus pada penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fleksibilitas alokasi dana sesuai kebutuhan nyata masyarakat terdampak. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Data yang diperoleh sebagian besar didasarkan pada wawancara, sehingga temuan yang dihasilkan sangat bergantung pada persepsi subjektif para responden. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data resmi yang lebih komprehensif terkait distribusi dana dan mekanisme pengawasan dari pihak berwenang membatasi analisis yang lebih mendalam tentang sistem pengelolaan dana darurat. Dalam penelitian ini, tidak semua aspek pengelolaan dana darurat dapat dibahas secara mendetail, khususnya terkait penggunaan teknologi digital atau inovasi sistem pembayaran untuk mempercepat pencairan dana.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian lebih mendalam mengenai penggunaan teknologi dalam mempercepat pencairan dana darurat, seperti pemanfaatan e-governance atau sistem digital untuk pelaporan dan pengawasan. Penelitian lebih lanjut juga dapat berfokus pada kajian komparatif antara berbagai wilayah terdampak bencana, guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan dana darurat. Selain itu, studi mengenai dampak jangka panjang dari keterlambatan pencairan dana terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga perlu diperhatikan, sehingga kebijakan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung proses pemulihan pasca-bencana.

Referensi

- Adiandari, A. M., et al. (2021). Developing a scale of financial attitudes in emergency fund ownership decision making. *Jurnal Manajemen*, 25(1), 145–149.
- Erwin, H. (2022). Perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada triwulan I 2022. *Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_2412022.aspx
- Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative research. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 36(6), 717-732. <https://doi.org/10.1046/j.1440-1614.2002.01100.x>
- Hakim, A. L., Hadiono, A., Mulyani, I., Jumanah, N., Sanjaya, N., & Destiana. (2022). Pemulihan ekonomi pasca bencana untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 10(1), 367–373.
- Hardati, P. (2013). Pertumbuhan penduduk dan struktur lapangan pekerjaan di Jawa Tengah. *Forum Ilmu Sosial*, 40(2), 222.
- Hasnda, N. A., Raihan, R. R., & Ali, F. M. (2023). Pemulihan roda ekonomi masyarakat terdampak gempa bumi Cianjur di Desa Benjot. *Jurnal Pengabdian West Sciece*, 2(6), 490-498.
- Kumajas, L. I., et al. (2021). Dana darurat di masa pandemi Covid-19. *Journal Modus*, 33(1), 1–17.
- Yanwardhana, E. (2023). Update gempa Cianjur terkini: Ini lokasi paling berbahaya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230124102737-4-407745/update-gempacianjur-terkini-ini-lokasi-paling-berbahaya>

Ethics declarations

Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors